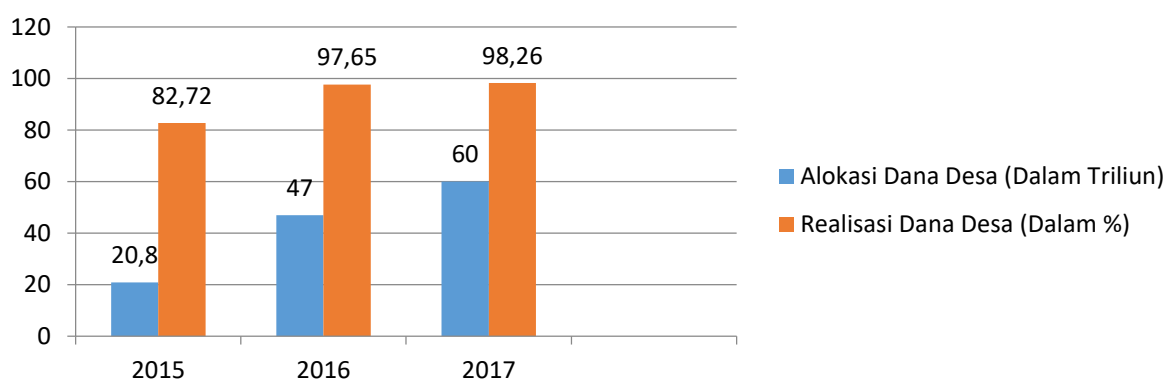


## Efektifitas Dana Desa Untuk Mendorong Swasembada Pangan

Dana desa diformulasi untuk mendukung pemerataan pembangunan, percepatan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Setiap tahun terjadi peningkatan dalam penerimaan dan realisasi dana desa di Indonesia. Pada tahun 2015, realisasi serapan dana desa mencapai 82,72 persen. Jumlah realisasi tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi 97,65 persen dan 98,26 persen di tahun 2017. Sementara hingga 31 juli 2018 realisasi dana desa mencapai Rp35,86 triliun (59,8 persen). Pemerintah telah menganggarkan dana desa sebesar 73 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

### Alokasi dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015 - 2017



Hasil evaluasi secara nasional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), penerima aliran dana desa menggunakan 80 persen untuk membiayai infrastruktur. Rinciannya, dalam tiga tahun terakhir ini dana desa digunakan untuk membangun 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, 5.116 unit tambatan perahu, 2.047 unit embung, 97.176 unit irigasi, dan lebih dari 120.000 km jalan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan 32.711 unit sarana air bersih, 291.393 unit penahan tanah, 6.041 unit poliklinik desa, 82.356 unit MCK, dan 45.865 unit sumur.

Sisanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan untuk para pemuda agar lebih produktif dan mandiri. Selain itu terdapat pula pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perencanaan bisnis. Uraian tersebut menjelaskan penggunaan dana desa belum maksimal untuk pertanian.

Padahal petani berjasa dalam menyukseskan program swasembada beras yang dicanangkan pemerintah. Angka impor beras dibanding volume konsumsi beras nasional masih dibawah 5 persen. Artinya 95% kebutuhan beras nasional masih ditopang oleh petani lokal. BPS juga mencatat penduduk paling banyak bekerja di sektor pertanian dan sekitar 60 persen kepala rumah tangga miskin di perdesaan mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama (Susenas 2017).

Dana desa yang dialokasikan untuk desa, dimana sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani, belum mampu membuat mereka

sejahtera. Selama ini dana desa memang cukup menyerap tenaga kerja dari kalangan usia produktif, melalui perbaikan sarana dan prasarana serta wirausaha dengan sistem pengembangan wisata. Tetapi, dana desa yang digunakan seperti ini akan membuat masyarakat di desa semakin jauh dari usaha dalam bidang pertanian. Padahal bidang pertanian merupakan kunci untuk mendukung kemandirian pangan desa.

Membangun kemandirian pangan berbasis desa dapat dilakukan dengan berbagai langkah, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor pangan. Petani desa bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha disektor pertanian, misal untuk membeli benih, pupuk, dan perlengkapan bertani. Karena selama ini penyedia jasa keuangan seperti bank masih enggan untuk memberikan pinjaman kepada petani.

BUMDes juga bisa berperan sebagai distributor kebutuhan untuk bertani sekaligus sebagai agen penjualan hasil pertanian. Mulai dari proses tanam, perawatan dari hama, hingga tahap panen, membeli dan menggiling jadi beras lalu menyimpan dan menyalurkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Keuntungan lain yang didapatkan dengan adanya BUMDes adalah lokasinya yang strategis. Karena berlokasi di desa, BUMDes lebih mudah di akses oleh petani dan masyarakat desa pada umumnya. Yang perlu *disupport* oleh pemerintah adalah bantuan permodalan, peralatan giling padi, kelengkapan administrasi modern seperti komputer, jaringan telepon dan internet serta pelatihan tata kelola usaha yang baik. Selain itu pelatihan pembukuan, manajemen logistik dan distribusi juga diperlukan untuk mendukung sistem administrasi BUMDes. Agar lebih efisien akan lebih baik jika kantor BUMDes berlokasi di wilayah Kantor Kepala Desa.